Pedagang Ayam Bangkit dari Keterpurukan

KEBUMEN (KR) - Harga ayam pedaging di Kebumen sejak 1 minggu sebelum Lebaran 2020 hingga minggu pertama Juli 2020, masih tinggi dan jauh di atas harga normal. Berkat tingginya harga itu para pemilik usaha peternakan ayam di Kebumen kini mampu bangkit dari keterpurukan. "Hasil penjualan ayam dengan harga tinggi tak hanya bisa menutup kerugian akibat jatuhnya harga ayam di minggu terakhir April sampai pertengahan Mei 2020 lalu. Juga, sudah mampu memberi keuntungan untuk perusahaan kami," ungkap Adhi, manajer produksi sebuah perusahaan kemitraan ayam pedaging di Kebumen, Minggu (5/7). Harga ayam pedaging di Kebumen pada Minggu (5/7) mencapai Rp 23.000/kg di tingkat peternak dan harga dagingnya Rp 33.000/kg di tingkat pedagang eceran pasar tradisional. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga normalnya, yaitu ayam pedaging Rp 17.000/kg di tingkat peternak dan daging ayamnya Rp 22.000/kg di pedagang eceran pasar tradisional.

"Pengalaman pahit kami saat harga ayam jatuh di bulan April hingga pertengahan Mei 2020 lalu, adalah akibat sulitnya distribusi ayam dan daging ayam karena akses masuk sejumlah daerah dibatasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," ujar Adhi. Akibat pembatasan itu stok ayam siap potong sangat melimpah dan sulit terjual, hingga harganya jatuh. Hanya Rp 5.000 sampai Rp 7.000/kg di kandang peternak. Harga daging hanya Rp 9.000 sampai Rp 10.000/kg. Saat harga jatuh perusahaan bisa rugi hingga Rp 5 miliar dan banyak usaha ternak ayam mandiri di berbagai daerah gulung tikar. **(Dwi)-o**

Purworejo Urutan Keenam Terkecil

PURWOREJO (KR) - Pemerintah bersama warga masyarakat dan komponen lainnya di Kabupaten Purworejo dinilai mampu mengendalikan wabah virus korona (Covid-19). Bahkan Purworejo dalam pandemi itu, kini menduduki urutan keenam terkecil dari 35 kabupaten/kota di Jateng. "Ini berkat upaya bersama pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan kedisiplinan mencegah Covid-19," kata Wakil Bupati (Wabup) Purworejo Hj Yuli Hastuti SH, Senin (6/7).

Pada penyerahan hadiah lomba Pos Kamling tingkat Kecamatan Bruno, di Pos Kamling Ketan Desa Kemiren Wetan Bruno Hj Yuli Hastuti mengatakan, bahwa dalam pengendalian Covid-19 ini, Purworejo yang sebelumnya berada pada posisi zona merah, kini sudah berubah menjadi zona kuning, "Artinya penularan Covid-19 menurun dan bisa dikendalikan," tandasnya. **(Nar)-o**

KR-Gunarwan

Wabup Purworejo Hj Yuli Hastuti menyerahkan tropi kejuaran lomba Pos Kamling.

Bupati Grobogan Ajukan Penyertaan Modal BUMD ke DPRD

GROBOGAN BERSEMI

GROBOGAN (KR) - Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM menegaskan, Badan Usaha Milik daerah (BUMD) merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh Pemkab yang diharapkan turut memberikan kontribusi pada kemajuan pembangunan ekonomi di daerah. Guna mendukung fungsi dan peran yang diemban oleh BUMD, Pemkab selaku pemilik dan pemegang saham mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan kepada BUMD, baik dukungan secara finansial maupun regulasi yang menjamin keberlangsungan operasionalnya.

"Salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemkab secara finansial adalah dengan memberikan penyertaan modal kepada BUMD yang dipandang perlu untuk mendapatkan suntikan dana guna peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Disamping itu, melalui penyertaan modal diharapkan akan memperkuat struktur modal perusahaan yang berimbas pada peningkatan kinerja dan profesionalisme, yang pada ujungnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah," ujarnya didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs H Teguh Harjokusuma MSi, Senin (6/7).

Pengajuan anggaran untuk menyuntik BUMD tersebut sudah diajukan ke DPRD setempat dua hari lalu untuk dibahas. Jika disetujui, pengajuan berbentuk Raperda tersebut menjadi Perda Grobogan. Dasar hukum pengajuan Raperda tersebut, kata bupati, adalah ketentuan pasal 21 ayat (5) Perda Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mengatur bahwa penyertaan modal kepada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun rencana penambahan penyertaan modal tahun 2021 akan dialokasikan kepada PT Bank Jateng sebesar Rp 10 miliar, yang rencana akan digunakan untuk peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan UMKM, serta peningkatan pelayanan perbankan, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jateng (PT Jamkrida) sebesar Rp 2 miliar, yang rencana akan digunakan untuk memperkuat permodalan dan peningkatan pelayanan. **(Tas)-o**

KR-M Taslim

Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs H Teguh Harjokusuma MSi.

Dipasangi Patok, Layanan Pemkot Magelang Tetap Jalan

MAGELANG (KR) - Pemasangan plang Sertifikat Hak Pakai (SHP) oleh Akademi TNI di kompleks Kantor Walikota Magelang, Jumat (3/7) lalu, bisa dipastikan tidak akan mempengaruhi layanan pemerintah kepada masyarakat. Kantor yang ditempati oleh jajaran Pemkot Magelang dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para Anggota DPRD Kota Magelang tersebut, dipastikan akan buka seperti biasa.

Walikota Magelang Sigit Widyonindito berharap masyarakat tidak khawatir dan panik dengan persoalan tersebut. Layanan pemerintah tidak terkendala meskipun ada plang atau patok papan Akademi TNI di depan kantor. "Selama ini Pemkot selalu kooperatif, berkomunikasi. Rakyat tidak perlu risau, ASN juga saya instruksikan tetap fokus bekerja melayani rakyat dengan baik," kata Sigit, ditemui, Minggu (5/7) sore.

Ia menilai, selama 4 tahun terakhir komunikasi soal aset lahan berikut bangunan Kantor Walikota Magelang intens dijalankan. Bahkan, Pemkot Magelang begitu aktif dengan koordinasi secara vertikal maupun horisontal. Walikota dan segenap jajaran Pemkot Magelang punya sejarah sehingga menempati lahan berikut bangunannya, bukan secara tiba-tiba. Untuk itu, ia mengingatkan bahwa persoalan ini sebaiknya jangan sampai mengusik warga, karena pada prinsipnya tanah seluas 4 hektare tersebut sama-sama milik negara.

"Tidak akan mungkin pada tahun 1985 lalu, Walikota dan jajaran Pemkot Magelang tiba-tiba menempati lahan dan bangunan ini, jika tidak ada kesepakatan, payung hukum, dan arahan dari pemerintah pusat. Pasti ada komunikasi. Maka dari itu, saya harap pada saat ini juga komunikasi lah yang dikedepankan," ujarnya.

Sejumlah OPD dan instansi yang berada di kompleks Kantor Walikota antara lain, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskomintsa),
Inspektorat, gedung Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip), serta Gedung DPRD Kota Magelang, dipastikan berjalan normal seperti biasa.

Sigit mengatakan, Dinkes Kota Magelang yang sejauh ini masih menjadi garda penanganan Covid-19 juga dipastikan tidak mengalami penurunan layanan. Pihaknya menjamin segala sesuatunya tengah ditempuh Pemkot Magelang, agar mendapatkan solusi antara kedua belah pihak. "Komunikasi tidak hanya sekarang (ketika terjadi masalah) saja. Bertahun-tahun memang selalu kita koordinasikan dan komunikasikan. Hanya dalam Kamis (2/7) memang masih dipending. Kita harus menghormati itu," ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Joko Budiyono menambahkan, pihaknya memastikan layanan publik tidak terdampak akibat adanya pemasangan plang SHP Akademi TNI tersebut. **(Bag)-o**

Pekerja Seni Siap Bermitra Atasi Covid-19

SEMARANG (KR) - Para pekerja seni, pranata cara, persewaan sound system, persewaan *tratak* dan jasa pemotretan serta shooting video, Senin (6/7) menggelar rapat di Pakintelan Gunungpati Semarang membahas dampak Covid-19 yang telah mematikan perekonomian mereka selama hampir 4 bulan. Mereka pun membentuk Paguyuban Pekerja Seni Semarang (PPSS).

"Pandemi Covid-19 membuat beberapa kegiatan hajatan yang menjadi lahan perekonomian kami ditiadakan karena aturan pencegahan. Karena itu selama pandemi usaha jasa kami mandeg dan mengakibatkan perekonomian keluarga hancur. Dengan berkumpulnya para pekerja seni dan jasa organizer ini kita mencoba untuk mencari jalan terbaik menghidupkan perekonomian dengan mengedepankan protokol keamanan dan kesehatan," ungkap Hadi Purnomo, Ketua PPSS, Senin (6/7).

Dalam pertemuan yang melibatkan perwakilan beberapa bidang usaha jasa, seperti MC atau pranatacara, persewaan sound system, penyanyi, musisi, fotografer dan videografer serta event organizer membicarakan upaya menembus birokrasi, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang untuk mencari jalan keluar agar bisa dibuka kembali keleluasaan menyelenggarakan hajatan yang tentu akan mengembalikan lahan perekonomian pekerja seni dan event organizer yang terlibat.

"Sekarang ini Pemkot Semarang telah membuka hotel, cafe dan tempat wisata, oleh karena itu kami pun berharap juga bisa memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan hajatan, meski diatur dengan standar protokol kesehatan. Kami pun sudah sepakat untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan," ujar Adi Mas Indro, Sekretaris PPSS.

Dalam deklarasi, PPSS menyatakan mendukung sepenuhnya Pemkot Semarang dalam mengatasi dan mencegah penularan Covid-19. Selain itu mengharapkan agar Pemkot Semarang melalui jajaran instansi, dinas, serta aparat terkait memberikan ruang kerja dan perizinan bagi pekerja seni untuk bisa menjalankan pekerjaannya kembali melalui kelonggaran penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan para pekerja seni atau hiburan.

Dalam waktu dekat PPSS akan menemui Walikota Semarang dan Kepala Dinas Pariwisata untuk menyampaikan hasil rapat paguyuban. "Kami siap menjadi mitra kerja Pemkot Semarang untuk mengatur beberapa kegiatan yang menyangkut hiburan atau hajatan sesuai standar protokoler kesehatan yang berlaku. Kami bersyukur, ada sekitar 2.500 rekan pekerja seni dan jasa organizer tidak ada yang dinyatakan positif Covid-19. Artinya bahwa selama ini mereka mampu menjaga kesehatan mereka dengan mengacu pada standar protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah," tambah Adi Mas Indro. **(Cha)-o**

KR-Chandra AN

Pekerja Seni Semarang Deklarasi dukung Pemkot Semarang cegah Covid-19 agar kondisi bisa kembali normal.

Gubernur Jateng Pesan Masker UMKM Purworejo

PURWOREJO (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memesan ribuan masker non medis kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Kabupaten Purworejo. Pesanan langsung dikirim ke Semarang oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DinKUKMP) Kabupaten Purworejo. "Pada tahap ini kita kirim 100.650 pcs masker non medis ke DinKUKM Provinsi Jateng di Semarang. Masker non medis ini pesanan Gubernur Jateng melalui DinasKUKM Jateng," kata Kepala DinKUKMP Kabupaten Purworejo Drs Bambang Susilo, Minggu (5/7). Masker pesanan gubernur ini dikerjakan oleh 44 pelaku UMKM yang membidangi fashion/penjahit. "Masker non medis ini berbahan baku combat 24s/30s dengan harga Rp 4.000/pieces," jelasnya.

Dikatakan, bahwa kegiatan ini sekaligus merupakan salah satu program Gubernur Jateng berupa Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) yang diperuntukkan khusus pelaku UMKM yang sedang mengalami kelesuan usaha. "Di tengah gencarnya penanggulangan penyebaran virus korona atau Covid-19, kegiatan ini diharapkan mampu menggiatkan ekonomi UMKM," katanya. Ditambahkan, bahwa masker tersebut rencananya akan dimohonkan kembali untuk masyarakat melalui DinKUKMP Kabupaten Purworejo sebanyak 55.000 pcs. Masker itu akan didistribusikan bagi masyarakat pelaku UMKM dan para pedagang pasar serta masyarakat luas di Kabupaten Purworejo. **(Nar)-o**

Mimbar Legislatif

Jogo Tonggo Percepat Penanganan Covid-19

UNTUK mempercepat penanganan wabah Covid-19 di Jateng, DPRD Jateng bersama Pemprov Jateng, aktif melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat, melalui program Jogo Tonggo, yang digagas oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Seperti yang dilakukan oleh Anggota DPRD Jateng dari daerah pemilihan (Dapil) sembilan, yang menyalurkan bantuan Jogo Tonggo Kit dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng ke Kabupaten Temanggung. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan pada Jumat (3/7).

KR-Budiono

Muhamad Ngainirrichaldi

Mewakili Anggota DPRD dari Dapil 9, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jateng Muhamad Ngainirrichaldi menyerahkan bantuan Jogo Tonggo Kit kepada Bupati Temanggung di Pendapa Kabupaten. Jogo Tonggo Kit tersebut untuk mendukung tugas-tugas relawan Jogo Tonggo dalam percepatan penanganan Covid-19 di tingkat desa. Paket bantuan itu berisi cairan disinfektan, baju cover all, sarung tangan, sepatu boot, dan masker.

Dengan Jogo Tonggo Kit diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mencegah penularan wabah Covid-19 yang masih mengkhawatirkan di Jateng. Dengan pemanfaatan Jogo Tonggo Kit diharapkan proses penyebaran virus korona bisa cepat berhenti. Masyarakat dapat menjalani kehidupan normal seperti tidak ada virus.

Di Temanggung terdapat 289 pos Jogo Tonggo yang dioperasionalkan oleh sekitar 16.000 relawan yang tersebar di seluruh kecamatan di Temanggung. Bantuan tersebut membuktikan kalau Anggota DPRD Jateng bersama Pemprov Jawa Tengah selalu bersama masyarakat, dikala senang dan susah. DPRD Jateng menilai keberadaan relawan Jogo Tonggo selama ini sangat membantu dalam penanganan Covid-19. Keberadaan relawan jogo tonggo sangat meringankan beban tugas tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Relawan setiap saat siap untuk turun ke lapangan untuk membantu menangani Covid-19.

Temanggung termasuk daerah yang masuk dalam kategori zona kuning atau risiko rendah dengan indeks 2,4. DPRD Jateng berharap Pemkab Temanggung bisa segera menaikkan level tersebut menjadi zona hijau,atau zona aman, sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali normal dan perekonomian bisa kembali pulih. **(*)-o**

***(Disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jateng Muhamad Ngainirrichaldi kepada wartawan** KR Biro Semarang, Budiono Isman)*

Kecam Aksi Formas PP, Lembaga Desa Ponggok Pasang Badan

KLATEN (KR) - Lembaga Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten yang terdiri dari pemerintah desa, BPD, BUMDes, tokoh agama, dan tokoh masyarakat mengecam keras aksi pemasangan spanduk bernada protes yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Peduli Ponggok (Formas PP). Aksi pemasangan spanduk itu dinilai cara jalanan.

"Kemarin ada forum yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Ponggok yang kurang lebih anggotanya sekitar 30-an orang, sedangkan jumlah warga Desa Ponggok sekitar 2.100 orang, jadi saya sampaikan itu (forum) hanya segelintir masyarakat yang belum puas terhadap program desa maupun keberhasilan yang sudah dicapai Desa Ponggok," ujar Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono, Minggu (5/7).

Mereka melakukan pemasangan spanduk di titik-titik tempat wisata yang tujuannya hanya akan merusak citra Desa Ponggok. Maka dari itu bersama lembaga desa yang terdiri dari pemerintah desa, BPD, kelompok sadar wisata, BUMDes, tokoh agama, dan tokoh masyarakat tidak terima dan membuat maklumat yang intinya siapapun yang merusak citra desa atau menghambat program desa akan berhadapan dengan lembaga desa.

"Tujuan kita adalah kolaborasi membangun desa demi kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu bagi yang merasa tidak puas bisa menyampaikan saat musyawarah desa. Di situ ada kelembagaan yang bisa digunakan untuk wadah komunikasi. Bukan justru menggunakan cara-cara jalanan seperti itu. Kami kelembagaan tidak terima sehingga mencopoti spanduk tersebut," tandasnya.

Menurut Junaedi, Formas PP selama ini belum pernah berbuat atau terlibat langsung dalam pembangunan Desa Ponggok. Namun mereka seolah-olah sudah merasa menjadi pahlawan dan merasa paling benar. "Kalau pun di Desa Ponggok ini, kami dari BUMDes dan pemerintah desa ada kekurangan atau kesalahan silakan menempuh proses hukum, kami siap dan kami menghormati proses hukum," ujar Junaedi. **(Lia/Sit)-o**